

ANALISIS PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) KEUANGAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KABUPATEN SOPPENG

Andi Jenni Indriakati¹, Masyadi², Muh. Sahrul³

Manajemen, Universitas Lamappapoleonro^{1,2,3}

andi.jenni@unipol.ac.id¹, masyadi@unipol.ac.id², sahrul09@gmail.com³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam membantu tugas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng, Untuk mengetahui sejauhmana pengendalian internal Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan dalam pengolahan data Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng yang berlokasi di Jalan Salotungo, populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh pegawai pada BPKPD Kabupaten Soppeng, Penentuan sampel menggunakan teknik non random sampling dengan jenis Quota sampling yaitu Metode pengambilan sampel berdasarkan sampel yang telah ditentukan oleh peneliti. sehingga yang menjadi sampel penelitian ini adalah Pegawai BPKPD yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan dan penggunaan langsung SIMDA Keuangan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 Responden. Untuk menganalisis penerapan SIMDA keuangan maka digunakan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi untuk mendeskripsikan pemahaman yang mendalam dari penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Keuangan. Dari hasil analisis deskriptif pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng sudah berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan secara umum pegawai sudah memahami dan mengetahui manfaat dan tujuan SIMDA Keuangan, selain itu faktor – faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKPD Kabupaten Soppeng sudah berjalan optimal dan kualitas informasi yang dihasilkan SIMDA Keuangan sudah cukup baik yaitu Andal, Tepat waktu dan Relevan. disarankan lebih memperhatikan pemahaman petugas SIMDA Keuangan, memaksimalkan faktor pendukung BPKPD Kabupaten Soppeng agar lebih baik dalam melaksanakan SIMDA Keuangan.

Kata Kunci : SIMDA, Keuangan, Kabupaten Soppeng.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Regional Financial Management Information System (SIMDA) in assisting the task of financial management at the Regional Financial and Revenue Management Agency (BPKPD) of Soppeng Regency, to find out the extent of internal control of the Regional Financial Management Information System in processing the data of the Financial and Revenue Management Agency. Soppeng Regency. This research was conducted at the Office of the Regional Revenue and Finance Management Agency of Soppeng Regency, located on Jalan Salotungo, the population in this study were all employees of the Soppeng Regency BPKPD. The determination of the sample used a non-random sampling technique with the type of Quota sampling, namely the sampling method based on samples that had been collected. determined by the researcher. so that the sample of this research is BPKPD employees who are directly involved in policy making and direct use of SIMDA Finance, so the number of samples in this study is 9 respondents. To analyze the application of financial SIMDA, a descriptive analysis technique is used using a phenomenological approach to describe a deep understanding of the application of the Regional Financial Management Information System. From the results of the descriptive analysis of the discussion, it can be concluded that the application of SIMDA Finance at the Financial Management Agency and Regional Revenue of Soppeng Regency has been running effectively, this is evidenced by the general understanding and understanding of the benefits and objectives of SIMDA Finance, in addition to the supporting factors that owned by BPKPD Soppeng Regency has been running optimally and the quality of information produced by SIMDA Finance is quite good, namely Reliable, Timely and Relevant. It is advisable to pay more attention to the understanding of

the Financial SIMDA officers, maximizing the supporting factors of the Soppeng Regency BPKPD so that they are better at implementing Financial SIMDA.

Keywords: SIMDA, Finance, Soppeng Regency.

PENDAHULUAN

Sejak berdirinya kemerdekaan negara di Indonesia, lembaga-lembaga publik telah diberdayakan oleh pemerintah pusat untuk mengatur administrasinya sendiri. Kewenangan negara tetangga untuk mencapai kemerdekaan regional diatur dalam Keputusan Provinsi No. 22 Tahun 1999 dan lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Daerah No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini memberi pemerintah negara bagian terdekat kemampuan untuk mengarahkan dan mengendalikan keluarga teritorial mereka sendiri, menentukan pendekatan mereka sendiri, dan memikul tanggung jawab pendanaan dan keuangan mereka sendiri.

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 memberdayakan pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Akun harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, kewenangan yang luas, lengkap dan konsisten harus ada untuk otoritas dan daerah lokal. Oleh karena itu, seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai klien otoritas publik dan perencanaan pengeluaran diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.

Untuk memenuhi tanggung jawab keuangan mereka, negara-negara tetangga berkomitmen untuk menggunakan inovasi data untuk memantau informasi mata uang dengan cara yang paling populer. Pemantauan informasi keuangan yang akurat dan efektif membutuhkan kerangka data yang andal, cepat, akurat, dan terkoordinasi untuk digunakan.

dari awal dan siap mengirimkan data penting yang dapat Anda percayai. Pasalnya, total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) dari tahun ke tahun semakin meningkat. Peningkatan volume nilai tukar jelas perlu

mengikuti peningkatan batas pengelolaan kas pemerintah.

Tujuan penelitian Untuk mengetahui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam membantu tugas pengelolaan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

LANDASAN TEORI

1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam PP tersebut, pengelolaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan prinsip keadilan, integritas, dan kepentingan masyarakat. b) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara terpadu yang dilaksanakan dalam APBD yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Menurut Wahab (2008), implementasi kebijakan dalam arti luas adalah tahapan proses kebijakan segera setelah peraturan perundang-undangan. Penegakan berarti pelaksanaan hukum dimana berbagai pihak, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kebijakan atau program tersebut. Implementasi kebijakan adalah "suatu proses dinamis yang melibatkan interaksi banyak faktor (Grizzle dan Pettijohn, 2002).

2. Laporan Arus Kas

Laporan yang menyajikan data tentang mata air tujuan, perubahan kas tanpa henti dari legislatif lingkungan selama periode pembukuan dan penyesuaian timbal balik kas tanpa henti pada tanggal perincian (PSAP 01, 2005: 85) Proklamasi pendapatan menyajikan data tentang penerimaan dan distribusi kas untuk satu periode tertentu. Penerimaan dan pembayaran kas ditandai dengan latihan kerja, latihan pendukung, dan latihan kontribusi. Pengumuman pendapatan menyajikan data tentang sumber, penggunaan, perubahan dalam resiprokal tunai tanpa henti selama periode pembukuan, dan keseimbangan rekanan tunai tanpa henti pada tanggal pengungkapan. (Nurlan Darise, 2008: 86). Penjelasan Pendapatan menyajikan data kas yang terkait dengan pekerjaan, pengelolaan uang, pendukung, dan latihan singkat yang menggambarkan keseimbangan awal, penerimaan, distribusi, dan penyesuaian kas akhir dari pemerintah pusat/daerah untuk periode tertentu.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Eksekusi moneter adalah jaminan yang terputus-putus atas kecukupan fungsional suatu asosiasi, yang penting bagi asosiasi dan perwakilannya mengingat tujuan, norma dan aturan yang masih belum jelas. Karena asosiasi pada dasarnya dijalankan oleh orang-orang, evaluasi pelaksanaan benar-benar merupakan penilaian terhadap cara manusia berperilaku dalam melakukan pekerjaan yang mereka mainkan dalam sebuah asosiasi.

Estimasi pelaksanaan sangat penting untuk mensurvei tanggung jawab asosiasi dan kepala unit kerja dalam menciptakan administrasi terbuka yang lebih baik. Tanggung jawab bukan hanya kapasitas untuk menunjukkan bagaimana kas publik dibelanjakan, tetapi juga mencakup kapasitas untuk menunjukkan bahwa kas publik telah dibelanjakan secara finansial, cakup, dan sungguh-sungguh. Diyakini bahwa penilaian pameran moneter pemerintah daerah akan memberikan manfaat untuk mengamati kemajuan keadaan moneter pemerintah daerah.

Menurut Indra Bastian (2006: 274) adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/ program/ strategi dalam memahami maksud, tujuan, misi dan visi suatu perkumpulan yang tertuang dalam penjabaran rencana pokok sebuah asosiasi.

4. Sistem Informasi Manajemen

Menurut Mcleod (2010:11) “sistem informasi manajemen (SIM) adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama”. Menurut Jogiyanto (2006:14) “sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen.

Berdasarkan pada beberapa definisi-definisi di atas dapat diartikan bahwa sistem informasi manajemen memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan.

5. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)

Sistem Informasi Keuangan Daerah disingkat SIKD adalah kerangka kerja yang melaporkan, mengatur, dan membentuk data administrasi moneter teritorial dan informasi terkait lainnya ke dalam data yang disajikan secara terbuka dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dalam rangka menyusun, mengaktualisasikan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Data moneter daerah adalah semua data yang terkait dengan rekening teritorial yang diperlukan dalam rangka mewujudkan kerangka data anggaran teritorial.

Program SIMDA merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah daerah sekitar dalam mewujudkan administrasi anggaran daerah. Sesuai dengan arahan undang-undang, pemerintah terdekat diharuskan untuk menyusun laporan moneter untuk memperhitungkan administrasi anggaran teritorial mereka. Untuk menyampaikan laporan anggaran tersebut, diperlukan suatu kerangka kerja yang dapat diandalkan, yaitu kerangka kerja khusus yang kompeten dalam menangani informasi (masukan) dan membuat data (hasil)

yang dapat digunakan oleh administrasi dalam menentukan pilihan. Aplikasi kerangka data administrasi kewilayahan merupakan program aplikasi komputer koordinat yang dapat membantu bentuk organisasi pemerintahan terdekat dari tingkat umum, kabupaten/kota, hingga kecamatan dan kota.

SIMDA terdiri dari 26 aplikasi terpartisi yang disebarluaskan di setiap SKPD dengan kerangka database koordinat, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan oleh para perintis wilayah untuk membantu penanganan pengambilan keputusan. Di sisi lain, dewan dapat menggunakannya untuk menyaring eksekusi pemerintah terdekat. SIMDA merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan akan data secara cepat, tepat, lengkap, tepat, dan terkoordinasi untuk mendukung bentuk-bentuk organisasi pemerintahan, membuka administrasi, serta mendorong kerjasama dan wacana yang terbuka dalam perincian pendekatan

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik subjektif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik eksplorasi subjektif dengan pendekatan fenomenologis menurut Creswell dalam (Sugiyono, 2014) adalah salah satu jenis metodologi subjektif dimana dalam pendekatan semacam ini spesialis mengarahkan persepsi pada anggota untuk mengetahui keanehan yang terjadi dalam kehidupan anggota. Hal ini dilakukan sebagai jenis pengumpulan informasi oleh spesialis yang kemudian ditangani untuk menemukan pentingnya apa yang telah diungkapkan oleh anggota. Fenomenologi pada dasarnya berencana untuk mencari tahu di dalam dan luar tentang proses kehidupan individu. Eksplorasi ini diarahkan pada suatu keadaan yang khas, sehingga tidak ada batasan dalam mengartikan atau menangkap kekhasan yang diteliti.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2006 : 118). Adapun

variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: SIMDA keuangan adalah Khusus Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam pengelolaan keuangan daerahnya

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kelompok dimana seorang peneliti akan memperoleh hasil penelitian yang dapat disamaratakan (digeneralisasikan). Populasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng.

Sampel adalah suatu sub kelompok dari populasi yang dipilih dalam penelitian. Penentuan sampel menggunakan teknik *non random sampling* dengan jenis *Quota sampling* yaitu Metode yang menjadi sampel penelitian ini adalah Pegawai BPKPD yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan dan penggunaan langsung SIMDA Keuangan, sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 Responden.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian Pustaka.

Penelitian Pustaka (*Library research*), yaitu pengumpulan data teoritis dengan cara menelaah berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu para Pegawai BPKPD Kabupaten Soppeng yang terpilih sebagai responden guna mendapatkan data-data yang diperlukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman SIMDA Keuangan

Memahami mengenai pengertian, tujuan dan Peran SIMDA keuangan, hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara berupa pernyataan dari salah satu pegawai yaitu Liesutini,SE.,M.Si Merupakan Kabid Akuntansi

pada kantor BPKPD Kabupaten Soppeng menyatakan bahwa “SIMDA Keuangan itu sistem pengelolaan keuangan mulai dari proses penganggaran, penatausahaan sampai pelaporan”, hal senada diungkapkan oleh Bapak Andi Nongki,SE.M.Si.,Ak yang merupakan Kabid Anggaran bahwa “SIMDA itu adalah sebuah sistem yang bekerja secara terintegritas yang dirancang oleh BPKP untuk mengolah data keuangan pemerintah daerah.

Selanjutnya Pengertian SIMDA Keuangan juga diungkapkan oleh Ibu Juniar,ST.,MM yang menjawab sebagai Kabid Pendapatan Pajak daerah mengungkapkan bahwa “SIMDA Keuangan itu sebuah aplikasi komputer untuk mengelolah transaksi-transaksi keuangan daerah”, kemudian Suwaedi,S.Sos yang menjawab sebagai Kabid Aset mengungkapkan bahwa “SIMDA Keuangan itu sistem pengelolaan keuangan mulai dari proses anggaran ke proses pelaporan.

Berdasarkan pengertian SIMDA Keuangan yang telah diungkapkan oleh Responden atau Informan maka dapat diketahui bahwa sudah sesuai dengan pengertian SIMDA Keuangan oleh BPKP (2007), menyatakan bahwa “SIMDA Keuangan yaitu sebuah sistem komputerisasi yang dirancang untuk membantu proses pengolahan laporan keuangan pemerintah daerah”.

Kemudian peran SIMDA Keuangan menurut beberapa responden pada BPKPD Kabupaten Soppeng salah satunya menurut Ani Pryanti,SE merupakan Kasubid Analisis Kebutuhan menyatakan bahwa “Selanjutnya menurut Suwaedi,S.Sos yang menjawab sebagai Kabid Aset saat ditanya mengenai bagaimana peran SIMDA Keuangan dalam mengolah Input sampai menghasilkan output, maka dijawab “Jurnal (input) merupakan dasar pembuatan buku besar (output), sedangkan buku besar merupakan input yang menjadi dasar pembuatan laporan keuangan seperti laporan arus kas, neraca dan laporan lainnya. Input dan output ini diolah secara otomatis oleh sistem, pekerjaan kita dimudahkan karena kita hanya bertugas untuk menginput data yang menjadi dasar pengolahan

output yang diinginkan. Peran SIMDA Keuangan memudahkan dan mempercepat semua proses, kami tinggal menginput data ke dalam program dan kemudian terolah sendiri. Tetapi kamipun tetap harus berhati-hati karena kesalahan seringkali terjadi pada saat proses penginputan data.

Kemudian Kebijakan mengenai Penerapan SIMDA Keuangan dan input serta output yang dihasilkan SIMDA Keuangan menurut beberapa responden adalah sebagai berikut : menurut Rohmawati,SE yang menjabat sebagai Kasubid Akuntansi penerimaan dan Pengeluaran Kas menyatakan bahwa “Mengenai penerapan SIMDA Keuangan di kantor ini, saya sangat setuju karena kami sangat terbantu dengan adanya aplikasi SIMDA. Karena kenapa? Sebelum memakai SIMDA Keuangan, kita memakai Ms. Excel sebagai sarana penyusunan laporan keuangan dan tidak terbayangkan bagaimana susahnya menyusun laporan keuangan dengan memakai Ms. Excel”.

Berdasarkan pendapat beberapa responden maka secara umum mengenai Kebijakan penerapan SIMDA Keuangan pada BPKPD Kabupaten Soppeng pada dasarnya seluruh Pegawai Setuju, karena dapat pekerjaan dapat lebih efektif dan efisien serta dapat menghemat waktu.

Kemudian Mengenai Input dan Output yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan menurut Kabid Akuntansi Liesutini,SE.,M.Si menyatakan bahwa “Di bagian akuntansi, mulai dari jurnal sampai laporan keuangan. Semua itu diolah dengan menggunakan SIMDA Keuangan, sama seperti di bagian lain, kami hanya bertugas menginput data ke dalam sistem dan mengawasi proses pengolahannya sampai menghasilkan laporan yang kita inginkan”. Kemudian menurut Andi Nongki,SE.,M.Si.,Ak menyatakan bahwa “Terdapat 3 laporan yang dihasilkan dari SIMDA Keuangan untuk bagian anggaran yaitu RKA, DPA, dan SPD”. Sedangkan menurut Kabid Pendapatan pajak daerah yaitu Juniar,ST.,MM mengungkapkan bahwa “Terdapat 5 macam laporan yang dihasilkan yaitu SPP, SPM, SP2D, STS dan surat pengendalian”. Kemudian menurut

Ani Pryanti,SE merupakan Kasubid Analisis Kebutuhan mengungkapkan bahwa “ada 3 output yang dihasilkan oleh SIMDA Keuangan yaitu RKA, DPA, dan SPD”.

2. Faktor Pendukung Penerapan SIMDA

Dalam Penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabuptaen Soppeng didukung oleh beberapa faktor, Dari hasil penelitian, faktor – faktor pendukung dalam menerapkan SIMDA Keuangan pada BPKPD Kabupaten Soppeng adalah :

a) Komunikasi

Penerapan SIMDA Keuangan akan menjadi efektif apabila tujuan dan prosedur penerapan SIMDA Keuangan dipahami dengan baik oleh para pengguna SIMDA Keuangan, dalam hal ini adalah para pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng. Tujuan penerapan, kebijakan serta prosedur penerapan SIMDA Keuangan akan dapat diketahui oleh Para pengguna SIMDA Keuangan apabila terlebih dahulu dikomunikasi dengan baik. Komunikasi dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupten Soppeng dilakukan melalui Sosialisasi SIMDA Keuangan. Sosialisasi mengenai SIMDA Keuangan yang dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupten Soppeng dilakukan cukup efektif, hal ini terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dimana salah satu responden yaitu Liesutini,SE.,M.Si yang merupakan Kabid Akuntansi menyatakan bahwa “Penerapan SIMDA Keuangan pasti sudah dikomunikasikan terlebih dahulu, baik dari atasan ke bawahan ataupun antara sesama pegawai. Tidak mungkin kita menerapkan tanpa ada komunikasi terlebih dahulu”,hal ini senada dengan pernyataan dari Jumiari,ST.,MM yang menjabat sebagai Kabid Pendapatan Pajak Daerah bahwa “Penerapan SIMDA Keuangan sebelum diterapkan sudah

ada komunikasi dari atasan, kalau ada kebijakan baru yang akan diterapkan, termasuk aplikasi terbaru maka akan disosialisasikan terlebih dahulu oleh atasan. Tentang tujuan kebijakan atau manfaat penerapannya”.

b) Sumber Daya Manusia

Pada BPKPD Kabupaten Soppeng salah satu upaya yang dilakukan adlah dengan cara memberikan sosialisasi atau pelatihan kepada pegawai, hal ini dinyatakan oleh salah satu responden yaitu Suwaedi,S.Sos menyatakan bahwa “Menurut saya sdm dikantor ini sudah memadai, upaya yang dilakukan kantor selama ini adalah dilakukannya pelatihan berjangka setiap tahun oleh mentor SIMDA”, hal senada juga diungkapkan oleh Suriani Usman,SE.,M.SI selaku Kabid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas menyatakan bahwa “Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM di sini khususnya dalam pengoperasian SIMDA Keuangan, dilakukan diklat SIMDA” Selanjutnya menurut Jumiari,ST.,MM juga mengungkapkan bahwa “Salah satu langkah untuk meningkatkan kapasitas SDM di sini khususnya dalam pengoperasian SIMDA Keuangan, dilakukan pelatihan khusus atau diklat SIMDA yang diadakan oleh BPKP”.

c) Sikap

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa Pegawai pada BPKPD Kabupaten Soppeng memiliki reponden dan sikap yang baik terhadap Implementasi Kebijakan Penggunaan SIMDA Keuangan, hal ini terlihat dari tanggap responden salah satunya yaitu Jumiarti,ST.,MM menyatakan bahwa “Kalau pendapat pribadi saya, saya merespon baguslah penerapan sistem ini, karena sangat membantu kita dalam memproses seluruh transaksi keuangan pemerintah, lebih mengefektifkan waktu, pokoknya sangat membantu.”, hal senada juga dingukapkan oleh Liesutini,SE.,M.Si merupakan Kabid Akuntansi bahwa “Saya sangat setuju dengan penerapan SIMDA Keuangan karena lebih

memudahkan dalam membuat laporan.” Selanjutnya pernyataan dari Andi Nongki,SE.,M.Si.,Ak merupakan Kabid Anggaran menyatakan setuju dengan penerapan SIMDA dengan menyatakan bahwa “Setuju saja karena memang penerapannya berdasarkan peraturan khusus yaitu permendagri 13 dan pedoman yang mendukung penerapannya.

3. Analisis Kualitas Informasi SIMDA

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rohmawati,SE selaku Kasubid Akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas. Beliau mengatakan bahwa “Ketepatan waktu Setelah diterapkannya SIMDA Keuangan ini, setiap staf yang bertanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan menjadi termotivasi atau tidak malas untuk melaksanakan tugasnya masing-masing, karena mereka merasa terbantu dengan adanya sistem ini, dan penyajian laporan akhirnya tidak pernah terlambat sejak diterapkannya sistem ini, yah sampai sejauh ini juga sistem ini Alhamdulillah tidak pernah mengalami masalah, sehingga penyajian laporan keuangan tidak pernah terlambat”. “Sejauh ini tidak pernah ada keluhan dari SKPD lain tentang sistem ini, ekspor-import data juga lancar lancar saja, itu kan berarti laporan kita tidak bermasalah”. “Setiap transaksi dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing, dan itu sudah terprogram langsung dalam sistem ini, kita hanya menginput data ke dalam sistem, dan sistem yang mengolahnya. Kalau sistem tidak saling berhubungan, berarti sistemnya gagal”

KESIMPULAN

Dari hasil analisis deskriptif Kualitatif dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penerapan SIMDA Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Soppeng sudah berjalan efektif, hal ini dibuktikan dengan secara umum pegawai sudah memahami dan mengetahui manfaat dan tujuan SIMDA Keuangan, selain itu faktor – faktor pendukung yang dimiliki oleh BPKPD Kabupaten Soppeng sudah berjalan optimal dan kualitas informasi yang dihasilkan

SIMDA Keuangan sudah cukup baik yaitu Andal, Tepat waktu dan Relevan.

SARAN

Saran peneliti untuk BPKPD Kabupaten Soppeng yaitu lebih memperhatikan pemahaman pegawai mengenai SIMDA Keuangan serta beberapa faktor pendukung yang memungkinkan pelaksanaan SIMDA Keuangan lebih efektif, sehingga laporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu dan dengan informasi yang dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- A Hall James. 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Terjemahan Dewi Fitriyani. Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.
- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- A. G Subarsono, 2005. Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta :PustakaPelajar.
- Arikunto, S. (2006). Prosedur Penelitian. Jakarta: Rienika Cipta.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2008. Kode Etik Dan Standar Audit. Edisi Kelima. Bogor : Pusdiklat BPKP.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Darise, N. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: PT Indeks.
- Hastono, Sutanto Priyo. (2007). Modul Analisis Data. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Jogiyanto, Hartono. (2006). Analisis & Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstrukturu

Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis.
Yogyakarta : Andi Offset.

Pangestu, Danu Wira. (2007). Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen (SIM). IlmuKomputer.com.

PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pegelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.

Rochaety, Eti. (2017). Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Satgas Pengembangan SIMDA. 2008. *SIMDA dan Penerapannya*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.